

BAB I

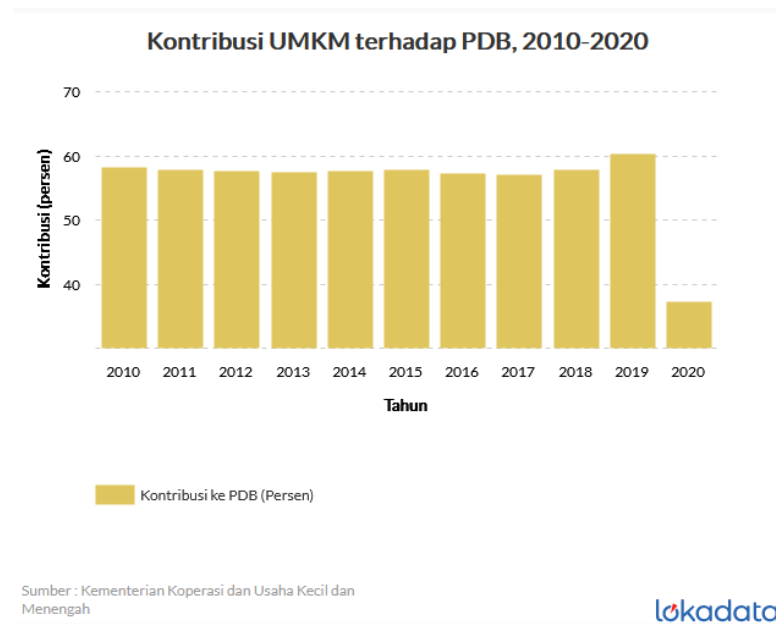
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga ataupun badan usaha kecil yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan upaya ekonomi produktif yang dilakukan perseorangan ataupun badan usaha dengan perbedaan kriteria kekayaan bersih yang masing-masing usaha mikro sebesar Rp. 50.000.000, usaha kecil sebesar Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000, dan usaha menengah sebesar Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000. UMKM juga adalah jenis usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, alasan banyaknya masyarakat yang menggemari jenis usaha ini adalah karena modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini tidak begitu besar (Hidayatulloh, 2020).

UMKM menjadi usaha yang mampu bertahan melawan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan bahwa UMKM terus bertambah jumlahnya. Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 65.465.497 unit, angka ini meningkat sebesar 1,98% dari tahun sebelumnya. Kemampuan bertahannya UMKM dalam menghadapi krisis ini dikarenakan UMKM terus melakukan penyesuaian dalam proses produksinya, juga terus

berkembang dan bertumbuh dengan cara mengandalkan modalnya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan hutang luar negeri. (Puspitasari, 2021).



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Gambar 1.1

Kontribusi UMKM

Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, UMKM mengalami penurunan dalam menyumbang produk domestik bruto (PDB). Kontribusi UMKM ke PDB pada 2020 adalah kontribusi terendah sejak 2010 yakni sebesar 37,3%, padahal pada tahun 2019 UMKM berhasil berkontribusi sebanyak 60,3% terhadap PDB. Besar penurunan ini adalah 38,14% dibandingkan tahun 2019. (Lokadata, 2021). Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho juga mengatakan bahwa hasil

Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia, menunjukkan selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan profit usaha menurun secara drastis, penurunan profit ini terjadi karena adanya peningkatan biaya produksi seperti bahan baku, transportasi, tenaga kerja dan biaya lain-lain sementara penjualan menurun. (Humas LIPI, 2020).

Kondisi seperti inilah yang memaksa para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kemampuan bisnisnya. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan bisnis adalah Kinerja pelaku UMKM, ini karena kinerja pelaku UMKM menjadi hal yang penting sebagai tolak ukur kemajuan usahanya. Kinerja pelaku UMKM sendiri dapat diukur melalui kemampuannya dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (Kusumadewi, 2017). UMKM yang dikelola dengan baik akan menghasilkan kinerja yang baik, ini berguna untuk persaingan ataupun perkembangan UMKM itu sendiri (Pricilia, 2019). Pelaku UMKM yang baik adalah pelaku UMKM yang terus memiliki optimisme untuk terus mengembangkan usahanya, meningkatkan usahanya dan terus berorientasi ke masa depan agar mendapatkan keunggulan dalam bersaing (Nur Hamidah, 2020)

Menurut Sanistasya (2019) saat ini kinerja pada UMKM di Indonesia masih cenderung rendah sehingga membuat UMKM sulit untuk bersaing. Rendahnya kinerja pelaku UMKM ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Menurut Pricilia (2019) masih banyaknya para pelaku UMKM yang kurang memahami akan dasar keuangan, kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh tingkat literasi keuangan ataupun inklusi keuangan yang rendah sehingga berdampak pada kinerja

pelaku UMKM. Kurangnya literasi keuangan ini dapat menyebabkan para pelaku UMKM memiliki permasalahan dengan hutang ataupun mendapatkan biaya kredit yang tinggi sehingga kecil kemungkinannya untuk bisa merencanakan keuangan di kemudian hari. (Suryani, 2017). Kurangnya literasi keuangan juga dapat membuat pelaku bisnis gagal dalam mengelola keuangan, kesahalahan dalam mengakses lembaga keuangan formal dan yang lebih fatal lagi adalah dapat menyebabkan kegagalan bisnis itu sendiri (Lestari, 2020).

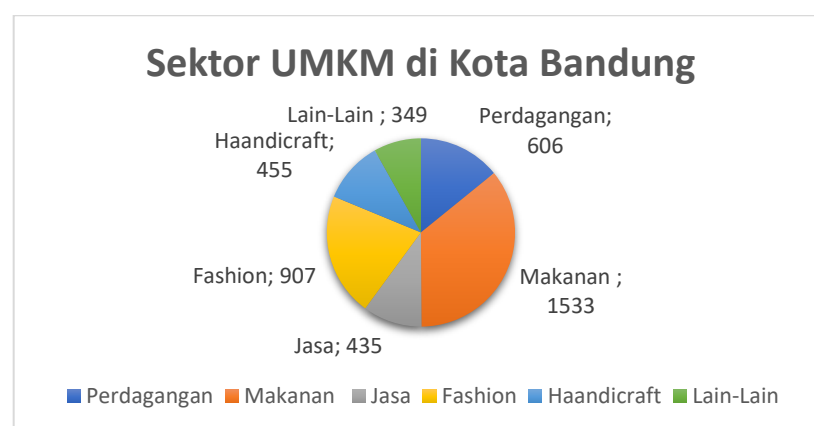
Literasi Keuangan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan dananya agar tetap menghidupkan serta mensejahterakan usahanya di masa yang akan datang (Herdinata, 2019) . Pelaku usaha yang memiliki literasi keuangan yang tinggi dapat membuat pelaku usaha bijaksana dalam mengelola keuangan usahanya, karena literasi keuangan yang tinggi mampu membuat pelaku usaha mahir dalam pengelolaan keuangan juga tepat dalam mengambil keputusan untuk usahanya (Farhani, 2021). Maka dari itu literasi keuangan adalah elemen penting untuk para pelaku usaha agar terhindar dari masalah keuangan, dengan pengetahuan dasar keuangan diharapkan para pelaku usaha dapat melakukan pengendalian terhadap keuangan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seperti yang diharapkan.

Inklusi keuangan sudah menjadi tujuan utama bagi pemerintah di banyak negara berkembang, pemerintah melakukan upaya luar biasa agar masyarakat dapat mencapai tingkat inklusi keuangan dengan mudah (Soetiono, 2018). Inklusi keuangan sendiri dapat dikatakan sukses apabila seluruh kalangan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal dengan mudah. (Desiyanti, 2020). Adanya

inklusi keuangan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Faktor lain dalam meningkatkan kinerja pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan memiliki artian sebagai suatu kegiatan mengelola keuangan individu ataupun kelompok dengan tujuan kesejahteraan keuangan (Untsa, 2017). Dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan pelaku usaha UMKM dapat mengambil keputusan akan keuangannya dengan baik. Maka dari itu pengelolaan keuangan menjadi aspek penting untuk kemajuan suatu usaha (Fatwitawati, 2018).

Di kota Bandung sendiri jumlah UMKM cukup pesat pertumbuhannya, Dinas Koperasi & UMKM Kota Bandung mencatat ada 4.285 pelaku UMKM yang tersebar di kota Bandung. Umkm ini terbagi menjadi banyak sektor seperti sektor makanan, sektor fashion, sektor perdagangan, sektor handicraft, sektor jasa, dan sektor lain-lain (Dinas Koperasi & UMKM, 2019).



Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil, Menengah, data diolah 2022

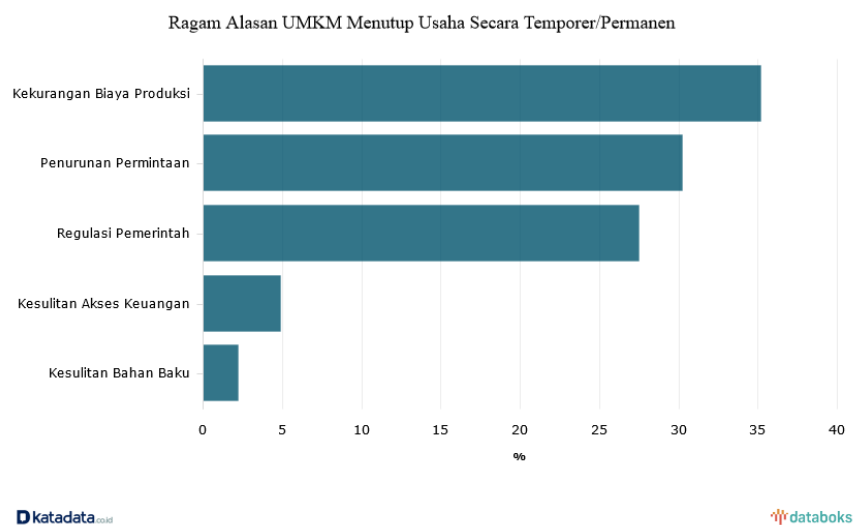
Gambar 1.2

Sektor UMKM di Kota Bandung

Permasalahan UMKM di kota Bandung tidaklah berbeda dengan UMKM yang berada di kota lain, salah satunya adalah karena pengelolaan keuangan yang tidak efisien yang menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang (Nizar, 2021). Pengelolaan keuangan seringkali menjadi suatu masalah yang terabaikan oleh para pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar (Untsa, 2017). Pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan akuntansi dan manajemen keuangan karena pencatatan keuangan yang buruk, penggunaan informasi akuntansi yang kurang baik sehingga tidak efisien untuk pengambilan keputusan keuangan, dan rendahnya kualitas keandalan data keuangan usahanya (Tharmini T, 2021). Pelaku UMKM pada umumnya hanya melakukan pencatatan keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran, bahkan hanya beberapa pelaku UMKM yang mencatat sewa tempat sebagai beban. Sehingga mereka mengira usahanya menghasilkan laba yang besar karena beban tidak dicatat semestinya, akibatnya keadaan keuangannya bukanlah keadaan keuangan yang sebenarnya (Fatwitawati, 2018).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pembiayaan menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan apalagi di tengah pandemi seperti ini, namun rasio kredit perbankan bagi UMKM masih rendah, hanya sekitar 20 persen. Rendahnya rasio ini disebabkan karena masih banyaknya UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan yang formal (Uly, 2021). Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adi Budiarmo mengatakan Inklusi Keuangan UMKM masih rendah, yang menyebabkan

terhambatnya penyaluran bantuan dari pemerintah. Menurutnya, sekitar 70% pelaku UMKM belum mendapatkan inklusi keuangan yang baik sehingga mereka kesulitan dalam mengakses bantuan keuangan dari pemerintah (Dinda, 2021).

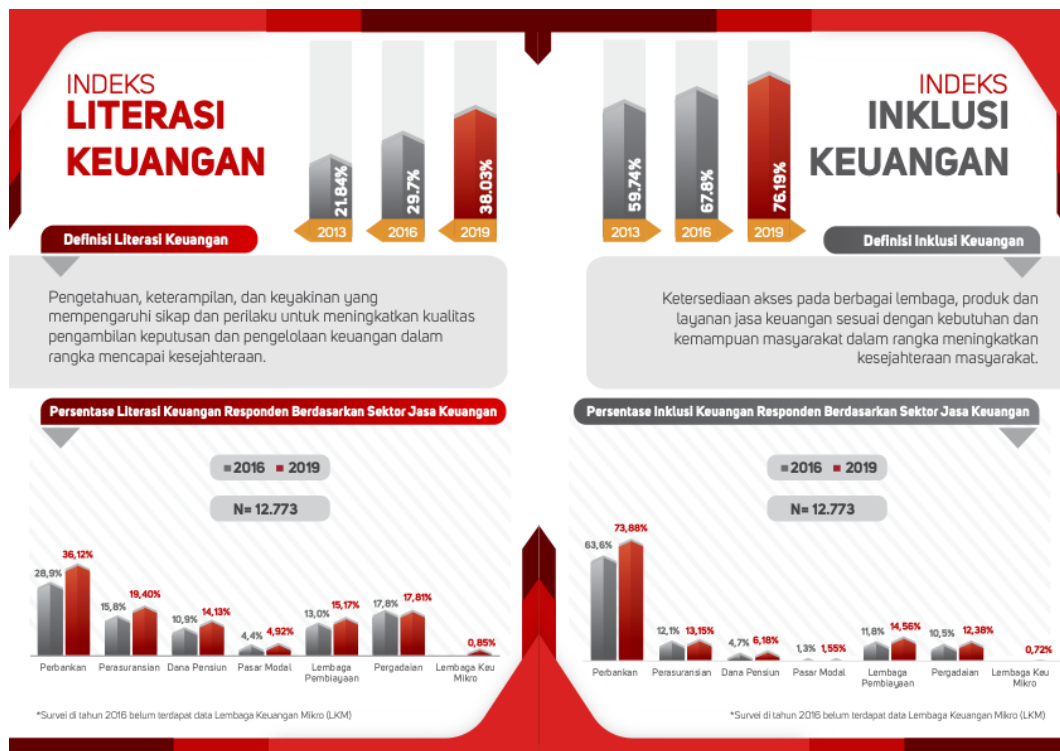


Sumber: Mandiri Institute

Gambar 1.3

Alasan UMKM Menutup Usaha pada Maret-April 2021

Survei yang dilakukan oleh Badan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) ini melibatkan 3.011 UMKM di Indonesia pada Agustus 2021 ini menunjukkan hasil bahwa 4,9% responden mengalami kesulitan akses keuangan. Kesulitan akses keuangan ini menjadi kendala bagi UMKM untuk bertahan di masa pandemi ini (Annur, 2021).



Sumber: OJK

Gambar 1.4
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan ini meningkat dari tiga tahun sebelumnya, namun OJK mengatakan bahwa umumnya masyarakat Indonesia belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang formal (Damara, 2021). Menurut Solichin cukup sulit untuk mengedukasi sebanyak 268 juta masyarakat dengan latar belakang dan demografi yang beragam. Oleh karena itu, tugas literasi keuangan harus melibatkan stakeholder seperti OJK dan industri keuangan (Syahrizal Sidik, 2020). Harapan kedepannya pelaku usaha mampu terus meningkatkan literasi

keuangannya, karena dengan literasi keuangan yang baik maka akan memotivasi pelaku usaha untuk mengakses lembaga keuangan yang sah (Zulkiefliimansyah, 2020).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanistya, Rahardjo dan Iqbal pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Usaha Kecil, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Puspitasari dan Astrini dengan hasil Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pelaku UMKM. Berbeda dengan penelitian Kusumadewi pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitasari dan Astrini dengan judul Dampak Literasi dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Bogor pada tahun 2021. Populasi yang digunakan pada penelitian sebelumnya berjumlah 102 pelaku UMKM. Metode pengumpulan data dalam penelitian sebelumnya adalah data primer yang bersifat kuantitatif, yaitu survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Kota Bogor.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel Pengelolaan Keuangan, variabel Pengelolaan Keuangan ini merupakan variabel independen. Alasan pemilihan variabel ini karena penulis ingin melakukan pengembangan serta ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan akan mempengaruhi Kinerja Pelaku UMKM. Selain itu, perbedaan lainnya adalah

pemilihan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Astrini pada pelaku UMKM di Kota Bogor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaku UMKM yang berada di Kota Bandung. Alasan penelitian pada UMKM ini karena dari hasil pengamatan, UMKM di Kota Bandung dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM di Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tahun 2020 UMKM mengalami penurunan dalam jumlah sumbangan produk domestik bruto (PDB) yaitu hanya sebesar 37,3%.
2. Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia, menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan dan penurunan profit usaha.
3. Terlambatnya penyaluran bantuan dari pemerintah untuk UMKM di masa pandemi ini dikarenakan 70% pelaku UMKM belum mendapatkan inklusi

keuangan yang baik. Sehingga mereka kesulitan dalam mengakses bantuan dari pemerintah.

4. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 yang menunjukkan indeks literasi keuangan hanya sebesar 38,03%.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Literasi Keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung
2. Bagaimana Inklusi Keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung
3. Bagaimana Pengelolaan Keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung
4. Bagaimana Kinerja pelaku UMKM di Kota Bandung
5. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pelaku UMKM di Kota Bandung
6. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pelaku UMKM di Kota Bandung
7. Apakah Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pelaku UMKM di Kota Bandung
8. Apakah Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pelaku UMKM di Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pelaku UMKM. Tujuan penelitian yang akan dipaparkan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui literasi keuangan para pelaku UMKM di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui inklusi keuangan pada pelaku UMKM di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kinerja pelaku UMKM di Kota Bandung.
5. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja pelaku UMKM di Kota Bandung.
6. Untuk menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja pelaku UMKM di Kota Bandung.
7. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja pelaku UMKM di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi manajemen mengenai Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, serta Kinerja Pelaku UMKM.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi serta memberikan kegunaan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM bagi penulis.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan pengetahuan akan literasi keuangan, inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kinerja usahanya.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan referensi dalam teori mengenai Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan diharapkan dapat

diimplementasikan sebagai materi dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam penyempurnaan terhadap peneliti selanjutnya yang memberikan gambaran atau referensi bagi peneliti yang berhubungan dengan Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi manajemen sebagai penambahan referensi bahan bacaan di perpustakaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Bandung, sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.